

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan. Program dan Kegiatan pada Renja 2024 ini mengacu pada Program dan Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2024) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategi, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Lamongan, Desember 2023

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19680114 198801 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2024;
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.



1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024.



1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU (TAHUN 2023)

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten



Lamongan

- 2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2024
- 3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan skpd tahun lalu 2022			Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) 2023	Target program/kegiatan renja SKPD tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Wajib										
2 18	Penanaman Modal Daerah										
2 18 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	100%		100%	100%	100%	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP	82,90%	82,90%	100%
2 18 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2 18 01 2.01 01	Penyusunan dokumen	Jumlah Dokumen	1 Dokum		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

					perencanaan perangkat daerah	Perencanaan	en					Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	100%
2	18	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100%	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	15 Laporan	100%
2	18	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	27 Orang		27 Orang	27 Orang	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang	27 Orang	100%
2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
						Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	-	-	-	100%
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%



REJENYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

					SKPD	realisasi kinerja semesteran akhir tahun						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi		2 Administrasi	2 Administrasi	100%	Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi	2 Administrasi	2 Administrasi	100%
2	18	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pemenuhan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	56 Stel		56 Stel	56 Stel	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%
2	18	01	2.05	09	Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang		5 Orang	5 Orang	100%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	20 Orang	100%
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi		6 Administrasi	6 Administrasi	100%	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	6 Administrasi	100%
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik	22 Item		22 Item	22 Item	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Paket	22 Paket	100%
2	18	01	2.06	03	Penyediaan	Jumlah	6 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100%	Jumlah peralatan	6 Jenis	6 Jenis	100%



REJENYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

					peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga yang dipenuhi						rumah tangga yang Disediakan			
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%	Jumlah Paket Logistik yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	8 Media		8 Media	8 Media	100%	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	100%	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	100%
						Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah	62 Perjalanan		62 Perjalanan	62 Perjalanan	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
2	18	01	2.07		Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100%	Jumlah Jenis Pengadaan	2 Jenis	2 Jenis	100%
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Set		4 Set	4 Set	100%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100%



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.07	06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, computer, notebook, printer	1 Software		1 Software	1 Software	100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	100%
2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	4 Rekening		4 Rekening	4 Rekening	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	18	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perlengkapan dan peralatan kantor	3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	18	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga administrasi	16 Orang		16 Orang	16 Orang	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
						Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan, petugas parker dan pengemudi	11 Orang		11 Orang	11 Orang	100%	-	-	-	100%



RENA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang dipelihara	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%	Jenis Barang yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	100%
2	18	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	100%
						Jumlah Motor Jabatan yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	100%	-	-	-	100%
2	18	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	100%
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	33 Unit	100%



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Jumlah perlengkapan yang dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100%	-	-	-	100%
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	2 Gedung		2 Gedung	2 Gedung	100%	Jumlah Gedung yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Jumlah Investor	64,2%		1%	1%	100%	Prosentase peningkatan Jumlah Investor	64,7%	64,7%	100%
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	35%		35%	35%	100%	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	4 Jenis	4 Jenis	100%
2	18	02	2.01	02	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	100%



REJENY DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi	35%		35%	35%	100%	Prosentase peningkatan Minat Investasi	35%	35%	100%
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Potensi Investasi yang dikembangkan	1 Updating Database		1 Updating Database	1 Updating Database	100%	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Peningkatan Investor Penanaman Modal	60%		60%	60%	100%	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	70%	70%	100%
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2	18	03	2.01	01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah dokumen strategi penanaman modal	1 Dokumen		1 Dokumen/ Film	1 Dokumen/ Film	100%	-	-	-	100%
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah pemeliharaan baliho	5 Pemeliharaan		5 Pemeliharaan	5 Pemeliharaan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%



RENJA DIINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						Jumlah pengunjung calon investor	2 Kali		2 Kali	2 Kali	100%	-	-	-	100%	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Penyelesaian Izin Online dan Offline Tepat Waktu	3692 Izin		3692 Izin	3692 Izin	100%	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu	3747 Izin	3747 Izin	100%	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2538 Izin		2538 Izin	2538 Izin	100%	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2500 Izin	2500 Izin	100%	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah Izin Usaha Yang Diterbitkan	1500 Izin		1500 Izin	1500 Izin	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	100%	
						Jumlah Pelayanan Izin Penunjang Usaha Yang Diterbitkan	1000 Izin		1000 Izin	1000 Izin	100%					100%



REJENYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04	2.01	02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000 Pelaku Usaha		1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	65,53%		65,53%	65,53%	100%	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	66,03%	66,03%	100%
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	Pembinaan Penanaman Modal PMDN dan PMA	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang terpantau Perkembangannya melalui Pelaksanaan Penanaman Modal	35 Perusahaan		35 Perusahaan	35 Perusahaan	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%



RENJA DIINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan yang dibina Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	70 Perusahaan		70 Perusahaan	70 Perusahaan	100%	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	100%
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah PMA/PMDN yang Diawasi	300 Perusahaan		300 Perusahaan	300 Perusahaan	100%	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	75 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	100%
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	1,5%		1,5%	1,5%	100%	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	2,0%	2,0%	100%
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	63 Perizinan		63 Perizinan	63 Perizinan	100%	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi	65 Perizinan	65 Perizinan	100%
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan	Jumlah Penyediaan Aplikasi Data yang di Update	7 Non Perizinan dan 56 Perizinan		7 Non Perizinan dan 56 Perizinan	7 Non Perizinan dan 56 Perizinan	100%	Jumlah Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	65 Perizinan	65 Perizinan	100%



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

				berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik							terintegrasi Secara Elektronik			



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari 1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - f. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

- a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
- b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
- c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	
1	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMDN	-	-	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%	30,00%	36,00%	1.5%	
2	Prosentase peningkatan realisasi Investasi PMA	-	-	1.5%	2%	2.5%	3%	3.5%	199.979.240.975	215.362.259.511	1.5%	
3	Prosentase Penyelesaian Izin tepat waktu	-	-	99.47%	99.57	99.67	99.77	99.87	30,00%	36,00%	99.47%	
4	Nilai SKM DPMPTSP	-	-	83.22	83.85	84.48	85.11	85.73	-	81.26	83.22	
5	Nilai SAKIP DPMPTSP	-	-	86.80	86.81	86.82	86.83	86.84	86.78	86.97	86.80	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai 3,55 – 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi investasi.
2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan



dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan sebagaimana pada tabel dibawah ini .



**Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lamongan**

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2		4	5	6	2		4	5	6	
	Wajib					Wajib					
	Penanaman Modal Daerah				7.042.800.671	Penanaman Modal Daerah				6.521.709.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	82.90	5.443.660.524	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP	Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik	82.90	5.161.609.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	40.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	30.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	DPM PTSP	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	15.000.000	APBD Kab.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	3.829.783.158	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	15 Laporan	3.442.971.000	APBD Kab.
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 org	3.799.333.158	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPM PTSP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 org	3.415.771.000	APBD Kab.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 Laporan	15.225.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPM PTSP	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Laporan	12.200.000	APBD Kab.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

			keuangan akhir tahun SKPD					laporan keuangan akhir tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Laporan	15.225.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Laporan	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi	2 administrasi	50.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah administrasi kepegawaian yang dipenuhi	2 administrasi	28.700.000	APBD Kab.
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	25.375.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPM PTSP	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	20.000.000	APBD Kab.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	20 orang	25.375.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPM PTSP	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	20 orang	8.700.000	APBD Kab.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	203.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPM PTSP	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	160.220.000	APBD Kab.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 Paket	20.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPM PTSP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 Paket	15.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	20.300.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPM PTSP	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	10.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	50.750.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPM PTSP	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	25.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Dokumen	40.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPM PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Dokumen	20.000.000	APBD Kab.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	20.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPM PTSP	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	19.000.000	APBD Kab.
Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	15 Laporan	10.150.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMP TSP	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	15 Laporan	10.000.000	APBD Kab.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	40.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPM PTSP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Laporan	61.220.000	APBD Kab.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan	2 jenis	35.525.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Jumlah Jenis Pengadaan	2 jenis	44.000.000	APBD Kab.
Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	15.225.000	Pengadaan Mebel	DPM PTSP	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Unit	14.500.000	APBD Kab.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	20.300.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	29.500.000	APBD Kab.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1.162.802.366	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	1.198.718.000	APBD Kab.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	378.729.076	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPM PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	361.482.000	APBD Kab.
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	14.260.750	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPM PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	20.000.000	APBD Kab.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	769.812.540	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPM PTSP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	817.236.000	APBD Kab.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang yang dipelihara	4 Jenis	121.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Jumlah barang yang dipelihara	4 Jenis	257.000.000	APBD Kab.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	25.375.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPM PTSP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	42.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	25.375.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit	20.000.000	APBD Kab.
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	20.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPM PTSP	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit	45.000.000	APBD Kab.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	50.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPM PTSP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	APBD Kab.
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPPTSP	Prosentase peningkatan Jumlah Investor	64.75%	300.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPPTSP	Prosentase peningkatan Jumlah Investor	64.75%	100.500.000	APBD Kab.
	Penetapan Pemberian Fasilitas / Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota		Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	150.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas / Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota		Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan	35%	500.000	APBD Kab.
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	15 Kegiatan Usaha	150.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	15 Kegiatan Usaha	500.000	APBD Kab.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Kemudahan Berusaha dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang diberikan	4 Jenis	150.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis Kemudahan Berusaha dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang diberikan	4 Jenis	100.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha Kabupaten / Kota	1 Dokumen	100.000.000	APBD Kab.
	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	70 %	614.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	70 %	202.000.000	APBD Kab.
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	614.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	2 Kegiatan	202.000.000	APBD Kab.
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	614.000.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	4 Dokumen	202.000.000	APBD Kab.
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Jumlah Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	3747 Izin	1.150.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Jumlah Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	3747 Izin	775.600.000	APBD Kab.
	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu di biang penanaman modal		Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2500 Izin	1.150.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu di biang penanaman modal		Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah	2500 Izin	775.600.000	APBD Kab.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha strategis secara elektronik		Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2500 Pelaku Usaha	850.000.000	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha strategis secara elektronik		Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	2500 Pelaku Usaha	674.000.000	APBD Kab.
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non peperizinan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	250.000.000	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non peperizinan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	54.000.000	APBD Kab.
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	720 Orang	50.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	720 Orang	47.600.000	APBD Kab.
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	66.03 %	552.600.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang berinvestasi	66.03 %	232.000.000	APBD Kab.
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	552.600.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota		Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	12 Bulan	232.000.000	APBD Kab.
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	100.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	15.000.000	APBD Kab.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	75 Pelaku Usaha	150.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	75 Pelaku Usaha	52.000.000	APBD Kab.
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	75 Kegiatan Usaha	302.600.000	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	75 Kegiatan Usaha	165.000.000	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	2%	0	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	Prosentase Data Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dikelola	2%	50.000.000	APBD Kab.
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	65 Perijinan	0	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	65 Perijinan	50.000.000	APBD Kab.
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Data Perijinan dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	65 Dokumen	0	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Jumlah Data Perijinan dan Informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	65 Dokumen	50.000.000	
TOTAL DANA ANGGARAN					7.042.800.671	APBD kab				6.521.709.000	



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.



Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lamongan**

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sesuai pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (Satu), **“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”**. Sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan
yang Berkeadilan”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang



terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. Berkeadilan adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram



Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (Satu) dan Misi 5 (Lima) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan Efektifitas Investasi (Misi 1)

Indikator :Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi

2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif (Misi 5)

Indikator :Nilai IKM/SKM

Sasaran

1. Meningkatnya Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA (Misi 1)

Indikator :

- Prosentase Peningkatan Realisasi Investasu PMDN
- Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
- Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu

2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan (Misi 5)



Indikator :

- Nilai SKM
- Nilai SAKIP DPMPTSP

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tujuan Dan Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan**

TUJUAN	SASARAN		2024	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	11	12
Meningkatkan Efektifitas Investasi	Meningkatnya realisasi Investasi Daerah Baik PMDN maupun PMA	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi	2.5 %	2.5 %
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	2.5%	2.5%
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	2.5%	2.5%
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	99.67	99.67
		Nilai IKM	84.48	84.48
		Nilai SAKIP DPMPTSP	86.82	86.82



3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.4 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah terdiri dari 6 program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.521.709.000,- (Enam Millyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) adapun rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program pengembangan iklim penanaman modal



1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/inisiatif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota

Sub kegiatan :

- Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

2. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten / kota

III. Program promosi penanaman modal

1. Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan

- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

IV. Program pelayanan penanaman modal

1. Kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal

Sub kegiatan

- Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha strategis secara elektronik
- Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
- Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

1. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal



- Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

V. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terinterasi sub kegiatan
 - Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 yaitu, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah”, dan Misi ke 5 (lima) yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mendukung Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.



**Tabel. T-C.33
RUMUSAN RENCANA AHIR POROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

Nama Dinas					: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Lembar Dari				
Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18				PENANAMAN MODAL				5.337.974.000				7.613.018.234
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal Dinas Penanaman Modal & PTSP		82.90	4.483.793.000	DAU		83.50	5.675.418.234
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		5 dokumen	17.000.000	DAU		5 Dokumen	40.000.000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		3 dokumen	8.500.000	DAU		3 Dokumen	20.000.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		2 laporan	8.500.000	DAU		2 Laporan	20.000.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		15 Laporan	2.964.751.000	DAU		15 Laporan	3.829.558.158
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		27 org	2.947.751.000	DAU		27 Orang	3.799.333.158
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	8.500.000	DAU		1 Laporan	15.000.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		14 Laporan	8.500.000	DAU		14 Laporan	15.225.000
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian yg dipenuhi		2 administrasi	-			2 Administrasi	34.075.000
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1 Paket	-	DAU		1 Paket	25.375.000
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan		20 orang	-	DAU		20 Orang	8.700.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dipenuhi	6 Administrasi	106.124.000			6 Adminis trasi	192.720.000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 Paket	10.000.000	DAU		22 Paket	15.000.000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	10.000.000	DAU		6 Paket	20.300.000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	20.000.000	DAU		4 Paket	50.750.000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	20.000.000	DAU		5 Paket	20.000.000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen	8.000.000	DAU		8 Dokumen	20.300.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		15 Laporan	8.124.000	DAU		15 Laporan	10.150.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		5 Laporan	30.000.000	DAU		5 Laporan	61.220.000
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pengadaan		2 jenis	-			2 Jenis	45.225.000
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		4 Unit	-	DAU		4 Unit	15.225.000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		5 Unit	-	DAU		5 Unit	30.000.000
2	18	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		3 Jenis	1.132.918.000	DAU		3 Jenis	1.215.965.076



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		4 Laporan	337.482.000	DAU		4 Laporan	378.729.076
2	18	01	2.08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 Laporan	13.000.000	DAU		3 Laporan	20.000.000
2	18	01	2.08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		3 Laporan	782.436.000	DAU		Laporan	817.236.000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara		4 Jenis	263.000.000			4 Jenis	312.875.000
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		15 Unit	42.000.000	DAU		15 Unit	42.500.000



REJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		3 Unit	20.000.000	DAU		3 Unit	25.375.000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		33 Unit	95.000.000	DAU		33 Unit	45.000.000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	106.000.000	DAU		2 Unit	200.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase peningkatan Minat Investasi		64.75%	35.500.000	DAU		65.75%	250.000.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang diberikan		35%	100.000	DAU		35%	100.000.000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan		15 Kegiatan Usaha	100.000	DAU		25 Kegiatan Usaha	100.000.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

						kemudahan berusaha di daerah							
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah Jenis Kemudahan Berusaha dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang diberk		4 Jenis	5.900.000	DAU		4 Jenis	150.000.000
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi investasi		1 Dokumen	5.900.000	DAU		1 Dokumen	150.000.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan		70 %	79.000.000	DAU		90%	202.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan promosi penanaman modal		2 Kegiatan	79.000.000	DAU		2 Kegiatan	202.000.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota		4 Dokumen	79.000.000	DAU		4 Dokumen	202.000.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan yang diterbitkan dalam satu tahun		3803 Izin	198.700.000			3860	904.000.000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Izin Melalui Sistem OSS dan Sistem Daerah		2500 Izin	198.700.000	DAU		2500 izin	904.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		2614 Pelaku Usaha	183.300.000	DAU		2500 Pelaku Usaha	725.000.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	04	2.01	00 07	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal		20 Kegiatan Usaha	15.000.000	DAU		20 Kegiatan Usaha	50.000.000
2	18	04	2.01	00 08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Tersedianya layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		720 Orang	-	DAU		720 Orang	129.000.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Pengendalian Perusahaan yang Berinvestasi		66.03 %	569.981.000	DAU		67.03%	506.600.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN		12 Bulan	569.981.000	DAU		12 Bulan	506.600.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	05	2.01	00 04	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		75 Kegiatan Usaha	85.497.000	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		20 Kegiatan Usaha	104.000.000
2	18	05	2.01	00 05	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		20 Pelaku Usaha	313.491.000	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		75 Pelaku Usaha	100.000.000
2	18	05	2.01	00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan		300 Kegiatan Usaha	170.993.000	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		300 Kegiatan Usaha	302.600.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola		2.5%	500.000			3%	75.000.000



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terintegrasi		65 Perijinan	500.000	DAU		65 Perijinan	75.000.000
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		65 Dokumen	500.000	DAU		65 Dokumen	75.000.000



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lamongan Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai



implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Desember 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**



JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19680114 198801 1 001